



Kurikulum Nasional Dan Kurikulum PAI

National Curriculum and Islamic Education Curriculum (PAI)

Nur Amri Ramadhan Abd.Gani¹, Muh.Akbar², Rukaeni³, Sumiati⁴

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email: nuramri795@gmail.com¹, muhammadakbar5303@gmail.com²,
jermaneny12@gmail.com³, sumiati@unismuh.ac.id⁴

Article Info

Article history:

Received : 02-07-2026

Revised : 04-07-2026

Accepted : 06-07-2026

Pulished : 08-07-2026

Abstract

Curriculum is a fundamental component of the educational system that serves as a guideline for achieving learning objectives. This paper aims to examine the concepts of the National Curriculum and the Islamic Education Curriculum, the models of curriculum development, and the contextualization of their implementation within Indonesia's educational system. The study employs a literature review method by analyzing relevant books, regulations, and scholarly publications on curriculum development. The findings indicate that the National Curriculum functions as the primary framework for ensuring educational quality and standardization, while the Islamic Education Curriculum plays a significant role in developing students' spiritual, moral, and character competencies based on Islamic values. Effective curriculum development requires systematic and adaptive models that respond to advances in science, technology, and societal needs. Furthermore, the implementation of the PAI curriculum should be contextualized through the integration of Islamic values with the Pancasila Student Profile, contextual learning approaches, the promotion of religious moderation, and the utilization of digital technology in the learning process. Therefore, the synergy between the National Curriculum and the Islamic Education Curriculum is expected to produce learners who are faithful, morally upright, competent, and well-prepared to face global challenges while preserving their Islamic and national identity.

Keywords: *National Curriculum, Religious Moderation, Pancasila Student Profile.*

Abstrak

Kurikulum merupakan komponen utama dalam penyelenggaraan pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pembelajaran. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji konsep Kurikulum Nasional dan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI), model-model pengembangan kurikulum, serta kontekstualisasi penerapannya dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pembahasan dilakukan menggunakan metode studi pustaka dengan menganalisis berbagai literatur, peraturan, dan referensi ilmiah yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kurikulum Nasional berperan sebagai acuan dalam mewujudkan standar pendidikan yang bermutu, sedangkan Kurikulum PAI berfungsi mengembangkan kompetensi spiritual, moral, dan karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai Islam. Pengembangan kurikulum memerlukan model yang sistematis dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Dalam implementasinya, Kurikulum PAI perlu dikontekstualisasikan melalui integrasi nilai-nilai keislaman dengan Profil Pelajar Pancasila, pembelajaran yang kontekstual, penguatan moderasi beragama, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, sinergi antara Kurikulum Nasional dan Kurikulum PAI diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, berkarakter, kompeten, dan mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan identitas keislaman dan kebangsaan.

Kata Kunci: Kurikulum Nasional, Moderasi Beragama, Profil Pelajar Pancasila



PENDAHULUAN

Kurikulum adalah sebuah konsep yang sangat krusial dalam bidang pendidikan, dan memiliki beragam makna yang mencerminkan kerumitan serta fungsinya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum dapat diartikan sebagai sekumpulan rencana dan pengaturan mengenai sasaran, konten, bahan ajar, serta metode yang digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan tertentu. Definisi ini merepresentasikan pemikiran bersama yang melibatkan sumbangan dari beragam ahli pendidikan, termasuk perspektif yang menyatakan bahwa kurikulum seharusnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Kurikulum nasional merupakan pedoman yang dirancang oleh pemerintah untuk mengatur serta mengendalikan proses pendidikan di seluruh institusi pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini mencakup banyak elemen, seperti daftar pelajaran yang perlu diajarkan, sasaran pembelajaran yang ingin diraih, dan cara pengajaran yang disarankan.

Dengan adanya kurikulum nasional, diharapkan tercipta keseragaman dalam pendidikan di seluruh negeri, sehingga setiap siswa mendapatkan pendidikan yang setara, terlepas dari lokasi atau jenis sekolah yang mereka hadiri. Kurikulum ini juga berfungsi sebagai panduan bagi pendidik dalam merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks peserta didik.

Pendidikan Agama Islam (PAI) memainkan peranan krusial dalam membentuk karakter dan moral peserta didik di Indonesia. Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi, PAI diharapkan dapat memberikan landasan spiritual yang kuat bagi siswa. Kurikulum Nasional dan Kurikulum PAI bukanlah dua entitas yang terpisah, melainkan saling melengkapi. Kurikulum Nasional memberikan kerangka umum pendidikan, sementara Kurikulum PAI memperkuat dimensi religius dan moral. Integrasi keduanya menjadi kunci dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak mulia. Kedua Pendidikan berlandaskan pada nilai-nilai dan falsafah hidup suatu bangsa. Pendidikan nasional didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, sedangkan pendidikan agama Islam didasarkan pada ajaran Islam dan kitab suci Al-Quran dan Hadist.

METODE PENELITIAN

Makalah ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan Kurikulum Nasional, Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI), dan pengembangan kurikulum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelaahan literatur, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan mengidentifikasi, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai konsep serta teori yang berkaitan dengan topik pembahasan. Hasil analisis disajikan secara sistematis dan deskriptif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep Kurikulum Nasional, Kurikulum PAI, model-model pengembangan kurikulum, serta kontekstualisasi implementasinya dalam pendidikan Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kurikulum Nasional

Sebagai sebuah negara yang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas edukasinya, Indonesia telah mengadakan beberapa kali revisi terhadap kurikulum nasional. Revisi kurikulum nasional dilakukan sebagai langkah untuk menghadirkan alat pembelajaran yang relevan dengan kemajuan zaman. Sejarah mencatat bahwa Kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia yakni



kurikulum 1947 sampai kurikulum 2013, kurikulum tersebut mengalami pembaruan-pembaruan mengikuti perkembangan dunia pendidikan yang semakin modern dan tentunya karena faktor perkembangan zaman. Berikut kurikulum dari dulu sampai sekarang.

1. Kurikulum 1947 (Rentjana Pelajaran 1947) Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah dalam bahasa Belanda *leer plan* artinya rencana pelajaran, istilah ini lebih populer dibanding istilah *curriculum* (bahasa Inggris). Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis, dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Saat itu mulai ditetapkan asas pendidikan ditetapkan Pancasila. Kurikulum ini sebutan Rentjana Pelajaran 1947, dan baru dilaksanakan pada 1950. Fokus Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat
2. Kurikulum 1952 (Rentjana Pelajaran Terurai 1952) Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum Pengembangan Kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, “Silabus mata pelajarannya jelas sekali, seorang guru mengajar satu mata pelajaran,” (Ahmad, 1998). Salah satu menjadi tolak ukur perubahan kurikulum 1947 ke kurikulum 1952 yaitu sekolah khusus bagi lulusan Sekolah Rendah 6 tahun yang tidak melanjutkan ke SMP. Kelas masyarakat mengajarkan keterampilan, seperti pertanian, pertukangan, dan perikanan tujuannya agar anak tak mampu sekolah ke jenjang SMP, bisa langsung bekerja.
3. Kurikulum 1964 (Rentjana Pendidikan 1964) Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964, namanya Rentjana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana. Panca wardhana berfokus pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan (keterampilan), dan jasmaniah (Hamalik, 2004).
4. Kurikulum 1968 Kurikulum ini merupakan perwujudan perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis yaitu mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jumlah pelajarannya yaitu berjumlah 9. Kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat. “Hanya memuat mata pelajaran pokok-pokok saja,” Muatan materi pelajaran pada kurikulum 1968 ini bersifat teoritis, tak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan (Djauzak).
5. Kurikulum 1975 Penyempurnaan kurikulum 1968 yang melahirkan kurikulum 1975 menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen MBO (management by objective). Metode, materi, dan tujuan pengajaran



dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan

6. Kurikulum 1984 Kurikulum ini juga sering disebut Kurikulum 1975 yang disempurnakan dengan memposisikan siswa sebagai subjek belajar, mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Learning (SAL). Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diujicobakan, mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional.
7. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999 Berdasarkan Undang-Undang no. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pemerintah memperbarui kurikulum Pengembangan Kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Pada kurikulum 1994 perpaduan tujuan dan proses belum berhasil karena beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masingmasing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesakkan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum.
8. Kurikulum 2004, KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) Pada 2004 diluncurkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) sebagai pengganti Kurikulum 1994. Suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung tiga unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.
9. Kurikulum Periode KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pelajaran) 2006 Kurikulum ini hampir mirip dengan Kurikulum 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan. Pada Kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
10. Kurikulum 2013 Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan, modifikasi dan pemutakhiran dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki tiga aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi.
11. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka hadir untuk memperkuat kualitas pembelajaran agar lebih relevan, adaptif, dan berpusat pada peserta didik. Berbeda dari pendekatan yang sangat berorientasi pada ketuntasan materi, kurikulum ini menekankan pendalaman konsep-konsep esensial dan memberi ruang bagi sekolah serta guru untuk menyesuaikan strategi mengajar dengan konteks kelas. Inti Kurikulum Merdeka: fokus pada capaian pembelajaran, pembelajaran yang fleksibel dan terdiferensiasi, serta penguatan karakter melalui proyek P5.



Kurikulum Nasional adalah panduan utama untuk pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Ini dikembangkan sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Kurikulum ini berperan sebagai referensi bagi semua lembaga pendidikan dalam menciptakan proses pembelajaran yang sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, UUD 1945, dan visi pendidikan nasional: menghasilkan generasi yang beriman, berpengetahuan, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat global.

Kurikulum PAI

Dalam era digital yang terus berkembang, sistem pendidikan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama dalam upaya mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan kurikulum nasional (Alpata, A. R., 2024). Pendidikan Agama Islam (PAI) memiliki fungsi yang krusial dalam membentuk kepribadian siswa, yang tidak hanya cakap dalam ilmu pengetahuan tetapi juga memiliki nilai-nilai moral dan spiritual yang kokoh. Tantangan ini semakin terlihat jelas di tengah perkembangan teknologi yang memasuki semua bidang kehidupan, termasuk dalam pendidikan. Kebutuhan untuk memperbarui kurikulum PAI yang dapat mengatasi tantangan zaman kini sembari menjaga nilai-nilai dasarnya menjadi semakin urgensi.

Di Indonesia, Kurikulum nasional telah beberapa kali mengalami revisi untuk menyesuaikan dengan perubahan global, namun upaya integrasi antara kurikulum PAI dan kurikulum nasional masih memerlukan kajian mendalam. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menggabungkan aspek keagamaan dan nilai-nilai Islam dengan kompetensi abad ke-21 yang diusung oleh kurikulum nasional (Abdillah & Hamami, 2021; Aripin, 2024; Madekhan, 2023). Digitalisasi dalam pendidikan menawarkan peluang besar bagi PAI untuk mengadopsi metode pengajaran yang lebih interaktif dan berbasis teknologi. Namun, hal ini juga memunculkan pertanyaan tentang batasan penggunaan teknologi agar tidak mengurangi esensi pendidikan agama itu sendiri (Alpata, A. R., 2024). Integrasi teknologi harus dilakukan dengan hati-hati, memastikan bahwa aspek moral dan spiritual tetap menjadi inti dari proses pembelajaran. Dalam konteks ini, rasionalitas untuk mengintegrasikan kurikulum nasional dengan PAI di era digital didasarkan pada kebutuhan untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0 dan masyarakat 5.0 (Syam dkk., 2023).

Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia telah melalui evolusi yang signifikan sejak awal periode kemerdekaan sampai Kurikulum Merdeka yang ada sekarang. Transformasi ini mencerminkan penyesuaian terhadap perubahan sosial, politik, serta kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan sasaran utama menciptakan individu yang beriman, berakhlak baik, dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Perubahan kurikulum PAI mencerminkan dinamika yang responsif terhadap perubahan sosial maupun politik. Dari kurikulum yang awalnya fokus pada hafalan hingga ke Kurikulum Merdeka yang mengutamakan pembelajaran yang relevan dengan konteks, PAI terus mempertahankan fokus pada tujuan pokok: menciptakan siswa yang beriman, berakhlak baik, dan dapat hidup rukun di masyarakat yang beraneka ragam.



Peran Kurikulum PAI dalam Mendukung Tujuan Kurikulum Nasional

Kurikulum Nasional Indonesia disusun sebagai acuan utama dalam pelaksanaan pendidikan yang berlandaskan pada Pancasila, UUD 1945, dan UU Nomor 20 Tahun 2003 Mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Sasaran utama dari kurikulum ini adalah membentuk Profil Pelajar Pancasila, yaitu peserta didik yang memiliki iman, menjalankan takwa, berakhlak baik, berpengetahuan luas, inovatif, berpikir kritis, serta memiliki daya saing secara internasional.

Dalam konteks ini, Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) memegang peranan penting. PAI tidak sekadar dijadikan sebagai pelajaran yang mengajarkan tuntunan agama, tetapi juga berfungsi sebagai alat dalam membangun karakter, moral, dan spiritual peserta didik. Oleh karena itu, Kurikulum PAI menjadi salah satu unsur yang sangat mendasar dalam mendukung pencapaian tujuan Kurikulum Nasional (Fahrurrozi Bonde, 2024). Kurikulum Nasional didasarkan pada Pancasila sebagai fondasi negara dan pandangan hidup rakyat. Di sisi lain, Kurikulum PAI berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan pendidikan agama yang ditentukan oleh pemerintah. Penggabungan kedua kurikulum ini menjalin keterkaitan antara nilai-nilai universal bangsa dengan ajaran religius Islam. Dalam aspek hukum, keberadaan PAI baik di sekolah umum maupun di madrasah diperkuat oleh UU No. 20 Tahun 2003, yang menekankan bahwa pendidikan agama merupakan komponen penting dalam kurikulum di semua tingkat pendidikan. Ini menunjukkan bahwa PAI bukan hanya pelengkap, melainkan bagian yang sangat vital dari sistem pendidikan nasional.

Tujuan Kurikulum Nasional adalah membentuk peserta didik yang memiliki keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. PAI mendukung tujuan tersebut melalui:

1. Penguatan iman dan takwa: PAI menanamkan nilai religius yang menjadi fondasi moral peserta didik.
2. Pembentukan akhlak mulia: PAI menekankan pentingnya etika, sopan santun, dan tanggung jawab sosial.
3. Pengembangan sikap toleransi: PAI mengajarkan nilai moderasi beragama, sehingga peserta didik mampu hidup harmonis dalam masyarakat yang plural.
4. Keterampilan sosial: PAI mendorong peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dengan menjunjung tinggi nilai keadilan dan persaudaraan.

Dengan demikian, PAI berperan sebagai penguat dimensi afektif dan spiritual dalam Kurikulum Nasional, sehingga tujuan pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berkarakter.

Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan nasional. PAI tidak hanya berfungsi sebagai mata pelajaran yang mengajarkan pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam membentuk karakter, moral, dan spiritual peserta didik. Dalam kerangka Kurikulum Nasional, PAI memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan nasional, yakni mencetak generasi yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, dan berdaya saing, dapat tercapai secara utuh. Peran strategis berupa:

1. Pembentukan Profil Pelajar Pancasila. PAI berkontribusi langsung dalam pembentukan dimensi religius, berakhlak mulia, dan gotong royong yang merupakan bagian dari Profil Pelajar



Pancasila. Melalui pembelajaran PAI, peserta didik diarahkan untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

2. Integrasi Nilai Karakter. Kurikulum PAI menekankan integrasi nilai karakter seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Nilai-nilai ini selaras dengan tujuan Kurikulum Nasional yang menekankan pendidikan karakter sebagai inti pembelajaran.
3. Moderasi Beragama. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, PAI berperan penting dalam menanamkan sikap moderat, toleran, dan menghargai perbedaan. Hal ini mendukung tujuan Kurikulum Nasional untuk mencetak generasi yang mampu hidup harmonis dalam keberagaman.
4. Kontekstualisasi Pembelajaran. PAI dalam Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran berbasis proyek yang kontekstual dengan kehidupan nyata. Peserta didik diajak untuk mengaitkan ajaran Islam dengan isu-isu sosial, lingkungan, dan teknologi, sehingga relevan dengan tantangan abad 21 (Fathiyah, Andi Alifah Nurul, dkk., 2025).

Strategi Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Kerangka Kurikulum Nasional

Kurikulum Nasional Indonesia disusun untuk menghasilkan siswa yang memiliki iman, taqwa, budi pekerti yang baik, pengetahuan yang luas, kreatif, berpikir kritis, serta dapat bersaing di tingkat global. Dalam konteks ini, nilai-nilai Islam berfungsi sebagai dasar moral dan spiritual yang signifikan. Menggabungkan nilai-nilai Islam ke dalam Kurikulum Nasional tidak mengarah pada pekarangan yang tertutup, tetapi justru menampilkan aspek religius yang terbuka, moderat, dan sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam. Strategi untuk menggabungkan nilai-nilai Islam ke dalam Kurikulum Nasional.

1. Integrasi dalam Tujuan Pendidikan

Nilai Islam diinternalisasikan dalam Profil Pelajar Pancasila: religius, berakhlak mulia, dan gotong royong. Strateginya adalah memastikan setiap mata pelajaran mengandung muatan karakter Islami seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab.

2. Integrasi dalam Struktur Kurikulum

- a. IPA: mengaitkan fenomena alam dengan kebesaran Allah.
- b. IPS: menekankan keadilan sosial dan kepedulian.
- c. Bahasa Indonesia: teks bacaan dengan pesan moral Islami.

Strategi integrasi nilai-nilai Islam dalam Kurikulum Nasional merupakan upaya menghadirkan pendidikan holistik yang seimbang antara kompetensi akademik dan moral. Dengan inovasi pedagogis, diferensiasi pembelajaran, serta pemanfaatan teknologi digital, nilai Islam dapat diinternalisasikan secara efektif dalam Kurikulum Merdeka, sehingga tujuan pendidikan nasional tercapai: mencetak generasi beriman, berakhlak mulia, toleran, dan berdaya saing global.

KESIMPULAN

Kurikulum Nasional dan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan dua komponen yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan pendidikan di Indonesia. Kurikulum Nasional berfungsi sebagai pedoman dalam menjamin mutu, standar, dan arah penyelenggaraan pendidikan, sedangkan Kurikulum PAI berperan dalam membentuk peserta didik yang beriman,



bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan secara sistematis melalui model-model yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Selain itu, implementasi Kurikulum PAI harus dikontekstualisasikan dengan tantangan pendidikan abad ke-21 melalui pembelajaran yang inovatif, penguatan moderasi beragama, integrasi Profil Pelajar Pancasila, dan pemanfaatan teknologi digital. Dengan demikian, sinergi antara Kurikulum Nasional dan Kurikulum PAI diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, karakter Islami, serta kesiapan menghadapi tantangan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Audi, Achmad Audi Pratama Jojang, Tasman Hamami, Moh Luthfih Gonibala, & Farhan Moh Fahrurrozi Bonde. (2024). *Perkembangan dan Problematika Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia*. Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam
- Alpata, A. R. (2024). Inovasi Kurikulum PAI: Integrasi antara Kurikulum Nasional dan Pendidikan Islam di Era Digital. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 2.
- Fathiyah, Andi Alifah Nurul, dkk. (2025). *Perubahan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia: Analisis Perubahan dan Tantangan*. Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Kurikulum Merdeka: Panduan Implementasi*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Nursobah A, E. M. (2025). Implementasi pendidikan Agama Islam Dalam Kurikulum Nasional. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*,
- Munir, Misbahul, dkk. (2025). *Dinamika Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia dari Masa ke Masa*. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar.
- sari, D. p. (2024). *Analisis Kesesuaian Kurikulum Pendidikan Agama Islam dengan Kurikulum Nasional*.
- https://lmsspada.kemdiktisaintek.go.id/pluginfile.php/722458/mod_resource/content/2/PERKEMBANGAN%20KURIKULUM%20DI%20INDONESIA.pdf diakses tgl 27 april 2026
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.